PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS SOSIAL

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2027



Jl. Pahlawan No. 4A Temanggung

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR TABEL v
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 8
1.4. Sistematika Penulisan 9
BAB II 10
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029. 10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial 19
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial 36
2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD 39
2.5. *Review* terhadap rancangan awal RKPD 40
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 57
2.7. Inovasi Perangkat Daerah 57
2.8. Penghargaan 59
BAB III 60
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 60
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 60
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial 60
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Sosial 64
BAB IV 128
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 128
4.1 Program dan Kegiatan 128
BAB V 138
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 138
5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 138
5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 138
BAB VI 141
PENUTUP 141

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 Dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial S.D Tahun 2026 Kabupaten Temanggung ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung 20
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten Temanggung 22
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung 23
Tabel 2. 5 Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027 40
Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027 41
Tabel 2. 7 Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Temanggung 57
Tabel 2. 8 Daftar Inovasi Perangkat Daerah 57
Tabel 2. 9 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung 59
Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja 61
Tabel 3. 2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Temanggung Tahun 2027 65
Tabel 4. 1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan 129
Tabel 5. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 138
Tabel 5. 2 indikator kinerja kunci tahun 2027 139

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Koordinator Bidang PPMP	Petugas Verifikator,
EWIEK KHAVIDA,S.STP,MM	DANI YULIAWATI, S.E
NIP. 198311182002122001	NIP. 198007062003122005

Mengetahui,
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203241992031003

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2027 ini dapat tersusun.

Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode Tahun 2027 Dinas Sosial, Renja Tahun 2027 perlu disusun dalam dokumen karena berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Dan juga didasarkan pada kebijakan dari pemerintah pusat dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dari dinas.

Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menyusun Renja Perangkat Daerah untuk pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2027, mengetahui capaian kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan 4, serta capaian kinerja Tahun 2026 sampai dengan Triwulan 1 dan bisa melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan, perubahan SOTK dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Tahun 2027 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini.

Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik.

Temanggung, 24 Juli 2026

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

Agus Sujarwo, AP, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197508051993111001

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

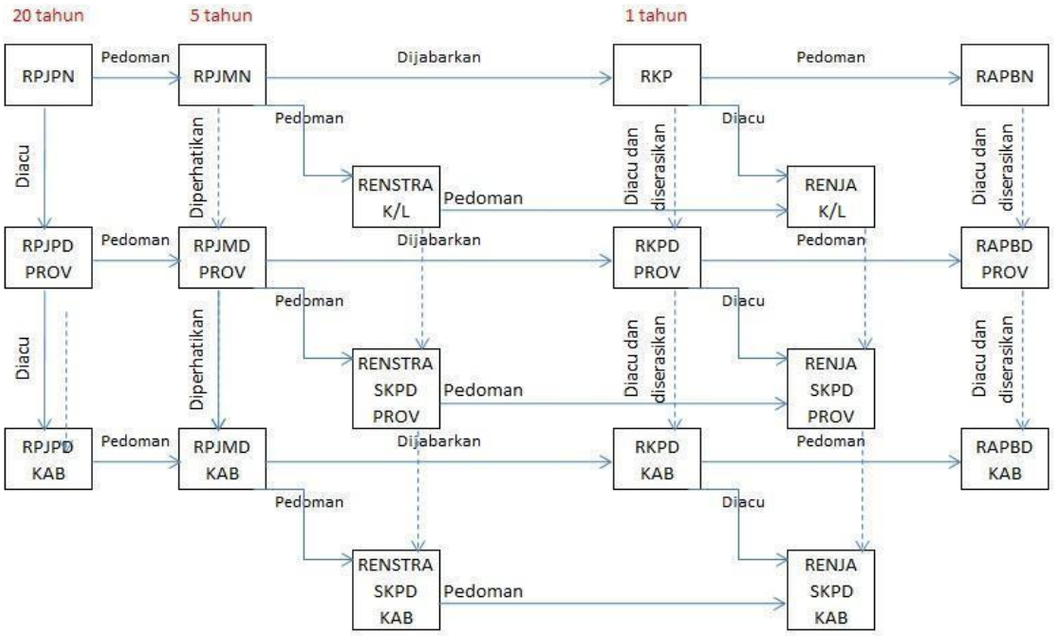
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja Dinas Sosial Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Sosial Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1. 1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Sosial, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Sosial, yang menyangkut aspek:

1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial;
2) Kondisi pelayanan Dinas Sosial;
3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial;
4) Data Pokok Pembangunan Dinas Sosial;
5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Sosial;
6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;dan
7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Sosial.

Analisis gambaran pelayanan Dinas Sosial;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Sosial adalah:

1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Sosial.
2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Sosial untuk kondisi tahun 2025-2029;
4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Sosial.

b. Me*review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Sosial;

Review hasil evaluasi mencakup:

1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

   Me*review* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Sosial. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
4) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025;
5) Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 urusan sosial.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Sosial;
3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Sosial;
4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

c. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Sosial.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's *(Sustainable Developmnet Goals)*;
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial;
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

d. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Sosial.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

e. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Sosial.

f. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

g. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam pembangunan daerah.

h. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Sosial**;**

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Sosial merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

i. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan,

terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

j. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial**;**

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

k. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Sosial dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Sosial **dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Dinas Sosial yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta

indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial untuk Tahun 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama kurun waktu Tahun 2027;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2027;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Sosial Tahun 2027; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029.

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan terhadap target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan dengan menggunakan capaian kinerja Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Sosial 2025-2029. Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s.d Tahun 2026 Kabupaten Temanggung

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7= 6/5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12=10/8*
01.06.01	***URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Persen	100	100	100		**5,883,208,383**		**1,429,121,992**	
1.06.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	Persentase penyediaan gai dan tunjangan ASN	Persen	100	100	100		**4,591,708,597**		**1,243,800,259**	
1.06.01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	41	41	100	41	4,591,708,597	41	1,243,800,259	100
1.06.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100		**94,683,460**	0	**9,345,000**	
1.06.01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	20	100	20	9,500,000	5	1,162,000	25
1.06.01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100					
1.06.01.2.06.04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	14,250,000	3	1,583,000	25
1.06.01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	9,500,000	3	1,306,000	25
1.06.01.2.06.08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	36	100	36	31,350,000	9	2,892,500	25
1.06.01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	25	100	25	30,083,460	6	2,401,500	24
1.06.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100		**1,000,965,945**	**0**	**159,966,233**	
1.06.01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100	12	5,700,000	3	0	25
1.06.01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	72,532,500	3	17,696,681	25
1.06.01.2.08.03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				4	8,550,000		240,000	0
1.06.01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	914,183,445	3	142,029,552	25
1.06.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100		**195,850,381**	**0**	**16,010,500**	
1.06.01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	90	90	100	90	142,500,000	20	14,270,500	22,22
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6	100	6	53,350,381	1	1,740,000	16,67

1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	Persen	100	100	100		170,000,000	0	150,000	
1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100					
1.06.02.2.02.0001	koordinasi dan sinkronasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	7	7	100			0	0	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100		**170,000,000**	39	**150,000**	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	25	83,33					
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	18	90					
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	6	4	66,67	5	150,000,000	0	0	0,00
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus	Orang	30	70	233,33	30		0	0	0,00
1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Lembaga				5	5,000,000	1	0	20
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang				50	10,000,000	35	150,000	70
1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan				12	5,000,000	3	0	25
1.06.03	***PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN***	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persen	100	100	100				0	
1.06.03.2.01	***Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal***	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	100	100	100				0	
1.06.03.2.01.0001	*Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal*	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	7	140	5	7,500,000	1	0	20
		Persentase penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100					
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100					
		Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100	100	100					
1.06.04.2.01	***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia***	Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Persen	100	100	100		**576,500,000**		**11,288,100**	

	Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									
1.06.04.2.01.01	*Penyediaan Permakanan*	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6	11	183,33	20	2,000,000	0	0	0
1.06.04.2.01.02	*Penyediaan Sandang*	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	130	150	115,38	130	5,000,000	0	150,000	0
407.02.008	*Penyediaan Alat Bantu*	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	15	75	5	10,000,000	0	0	0
1.06.04.2.01.04	*Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga*	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	10	250	5	5,000,000	1	615,000	20
1.06.04.2.01.05	*Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial*	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	41	102,5	40	5,000,000	0	0	0
1.06.04.2.01.06	*Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat*	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75	82	109,33	50	25,000,000	14	6,825,500	28
1.06.04.2.01.07	*Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak*	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	214	5350					
1.06.04.2.01.08	*Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar*	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	100	3	2,500,000	1	245,000	33
1.06.04.2.01.09	*Pemberian Layanan Data dan Pengaduan*	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	1.143	1143	100	8,000,000	47	0	47
1.06.04.2.01.10	*Pemberian Layanan Kedaruratan*	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	214	237,78	248	504,000,000	25	3,452,600	10
1.06.04.2.01.11	*Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga*	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	10	250	10	4,000,000	0	0	0
1.06.04.2.01.12	*Pemberian Layanan Rujukan*	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	47	235	5	5,000,000	6	0	120
1.06.04.2.01.0014	*Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota*	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				5	1,000,000	25	0	500
1.06.04.2.02	***Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial***	Presentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persen	100	100	100		**348,250,000**		**4,819,307**	
1.06.04.2.02.0002	*Pemberian Layanan Kedaruratan*	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	230	383,33					
1.06.04.2.02.0003	*Penyediaan Permakanan*	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				240	348,250,000	139	4,819,307	58
1.06.04.2.02.06	*Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti*	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	4	100					
1.06.04.2.02.0008	*Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA*	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	28	140					

1.06.04.2.02.0014	*Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota*	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100					
01.06.05	***PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL***	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persen	100	100	100		10,564,109,728		**12,180,150**	
		Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persen	100	100	100					
1.06.05.2.01	***Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar***	Persentase pemenuhan Kebutuhan Sosial bagi Anak-anak Terlantar	Persen	100	100	100		**806,631,000**		**1,023,900**	
1.06.05.2.01.01	*Penjangkauan Anak-Anak Terlantar*	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak	267	257	96,25	269	799,131,000	0	0	0
1.06.05.2.01.0002	*Rujukan Anak-Anak Terlantar*	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak				15	7,500,000	4	1,023,900	26,67
1.06.05.2.02	***Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100		**9,757,478,728**		**11,156,250**	
1.06.05.2.02.0001	*Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten Kota yang di data	Orang	399.832	386.093	96,56	392,920	35,001,738	0	1,600,250	0
1.06.05.2.02.0004	*Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	67	67	100	60	702,500,000	0	3,847,500	0
1.06.05.2.02.0006	*Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga*	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	34.000	57.353	168,69	114,249	9,014,976,990	0	5,708,500	0
1.06.05.2.02.0008	*Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Orang	73907	67926	91,91	75,754	5,000,000	64,400	0	85,01
01.06.06	***PROGRAM PENANGANAN BENCANA***	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	Persen	100	100	100		87,000,000		**5,873,200**	
1.06.06.2.01	***Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota***	Persentase terpenuhinya kebutuhan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan kerentanan sosial	Persen	100	100	100		**47,000,000**	**0**	**5,873,200**	
1.06.06.2.01.0001	*Penyediaan Makanan*	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	673	673	100	22,500,000	131	5,873,200	131
1.06.06.2.01.0002	*Penyediaan Sandang*	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	673	673	100	20,000,000	131	0	131
1.06.06.2.01.0004	*Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan*	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	67	167,5	30	1,500,000	13	0	43,33
1.06.06.2.01.0005	*Pelayanan Dukungan Psikososial*	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	673	1346	30	1,000,000	131	0	436,67
1.06.06.2.01.0007	*Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi*	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	17	1700	10	2,000,000	13	0	130
1.06.06.2.02	***Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota***							**40,000,000**		**0**	
1.06.06.2.02.02	*Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana*	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	60	100	60	40,000,000	20	0	33,33

01.06.07	***PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN***	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100		**66,000,000**		**16,464,000**	
1.06.07.2.01	***Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota***		Persen	100	100	100		**66,000,000**		**16,464,000**	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	202	224	110,89	250	66,000,000	250	16,464,000	100

Sumber: Dinas Sosial *Kabupaten Temanggung, 2026*

Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    h. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    j. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    k. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    l. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    m. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    n. koordinasi dan sinkronasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang
    o. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
    p. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
    q. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
    r. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
    s. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
    a. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
    b. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
    c. Penyediaan Permakanan
    d. Penyediaan Sandang

e. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
f. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
g. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
h. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
i. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
j. Pemberian Layanan Kedaruratan
k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
l. Pemberian Layanan Rujukan
m. Pemberian Layanan Kedaruratan
n. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
o. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
p. Penyediaan Makanan
q. Penyediaan Sandang
r. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
s. Pelayanan Dukungan Psikososial
t. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
u. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
   a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
   b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
   c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
   d. Penyediaan Alat Bantu
   e. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
   f. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
   g. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

4. Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
   a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program antara lain dikarenakan tidak dilakukannya reviu atau penyesuaian target setelah adanya pemotongan anggaran.
   b. Setelah dilakukan verifikasi ternyata penghuni anak panti ada perubahan akan tetapi tidak dilakukan penyesuaian terget.

   Sementara faktor penyebab terpenuhi target kinerja program/kegiatan karena sudah sesuai dengan perencanaan dan untuk yang melebihi target antara lain disebabkan pelayanan yang besifat respon kasus di mana semua PPKS yang membutuhkan layanan di tangani semua.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial tetap dapat tercapai atau tidak di akhir tahun 2026.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain untuk lebih cermat dalam melaksanakan kegiatan sehingga apa yang sudah tertuang dalam target perencanaan akan dapat tercapai dan segera melakukan reviu untuk penyesuaian dengan situasi dan kondisi sehingga lebih dapat optimal dalam mewujudkan capaian kinerja berikutnya.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori ***Baik*** yaitu dengan nilai **98,98%,** .

Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. **Meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani.** Tercapai sebesar 100% dari target 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”
2. **Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik.**

Dinas Sosial dalam Pelayanan Publik terdapat pengukuran indikator Nilai IKM dengan kondisi Nilai Dinas Sosial Tahun 2025 sebesar 78,20 dari target sebesar 70 dengan capaian 100% memiliki kategori “Sangat Tinggi”.

Indikator berikutnya adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah. Pada Tahun 2026 Triwulan I dan II masih menggunakan nilai didapatkan dari hasil pengukuran indikator kinerja Nilai Perangkat Daerah Tahun 2025 sebesar 78,20 dari target sebesar 70 dengan capaian 100% memiliki kategori “Sangat Tinggi”.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, Indikator Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Kunci. Adapaun penjelasan masing-masing indikator tercantum pada tabel 2.2 -2.5 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
INDIKATOR KINERJA UTAMA									
1	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		84.065	84.5	85.1	91,44	99,84	100	ST
2	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani		68.13	69	70.2	82,87	99,68	100	ST
	Nilai IKM Perangkat Daerah		87.0	87.01	87.02	89,98	89.98	100	ST
	Nilai AKIP Perangkat Daerah		70	72	74	78,20	78.20	100	ST
INDIKATOR PROGRAM 1									
1	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial		100	100	100	100	100	100	ST
2	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		100	100	100	100	100	100	ST
3	Persentase anak telantar yangmemperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		100	100	100	100	100	100	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
4	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		100	100	100	100	100	100	ST
5	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		100	100	100	100	100	100	ST
6	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		100	100	100	100	100	100	ST
7	Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan		100	100	100	100	100	100	ST
8	Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif		86	86	86	97,22	97,22	100	ST
9	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota		100	100	100	100	100	100	ST
10	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan		100	100	100	100	100	100	ST

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
INDIKATOR SPM									
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	197	150	150	197	10	10	SR
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Orang	643	52	52	643	33	33	R
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	132	137	137	132	4	4	SR
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	82	50	50	82	14	14	SR
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	673	350	350	673	131	131	SR

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/ R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
INDIKATOR IKK									
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	ST
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	ST

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada tahun 2026 dari 1 (satu) Indikator Tujuan (dengan satu Indikator kinerja utama), 1 (satu) Indikator Sasaran strategis (dengan tiga Indikator kinerja utama) serta 6 (enam) Program (dengan sepuluh indikator program) di Dinas Sosial, masuk pada kriteria “Sangat Tinggi” yaitu 100 %.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

i. Capaian Kinerja Tujuan: Meningkatnya penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Pengukuran capaian Kinerja Tujuan Dinas Sosial Tahun 2026 dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial. rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dari target 84, 065 % dengan realisasi 99,84 % atau capaian kinerja 100% masuk pada kriteria “Sangat Tinggi”.

Faktor yang mendorong untuk mendukung capaian kinerja tujuan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Adanya identifikasi kebutuhan PPKS melalui pemberian perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
2. Tingginya motivasi dan partisipasi aktif dari PSKS dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial;

Sedangkan faktor yang menghambat dari capaian kinerja tujuan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam memberikan bantuan sosial;
2. Kurang optimalnya PSKS dalam melakukan pendampingan sosial dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS);

Upaya yang dilakukan untuk dapat mengoptimalkan capaian kinerja tujuan adalah:

1. Pemerintah Desa wajib melakukan pemutakhiran data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dengan adanya verifikasi validasi dan pengelolaan data yang baik Dinas sosial memiliki data base yang valid sehingga bisa digunakan dalam penentuan kebijakan;
2. Memberikan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia PPKS;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan koordinasi lintas sektor dalam melindungi kelompok rentan seperti anak terlantar dan korban kekerasan.

ii. Capaian Kinerja Sasaran

- **Sasaran 1 : Meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani**

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah Meningkatnya pemerlu pelayanan terhadap PPKS yang ditangani serta meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik

Persentase pemerlu pelayanan terhadap PPKS yang ditangani sebesar 100% dari target 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Analisa perbandingan antara target dan realisasi sasaran daerah tahun 2025 adalah Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan target 69 % terealisasi 99.68 % atau tercapai 100%.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya kinerja Sasaran Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yaitu dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yang bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN serta dari sistem sumber lainnya.

Sedangkan Faktor penghambat pada kinerja sasaran ini adalah terdapat kegiatan yang bersifat respon kasus. Upaya yang dilakukan adalah perlu diadakannya kegiatan yang dapat menampung atau memfasilitasi bagi PPKS secara berkelanjutan.

- **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik**

Perbandingan antara target dan realisasi daerah tahun 2026 dalam meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik adalah Nilai IKM Perangkat Daerah. Nilai IKM Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada tahun 2026 Triwulan I dan II masih menggunakan nilai realisasi Tahun 2025 dikarenakan nilai realisasi dan IKM belum *release.*

Faktor yang mendorong capaian kinerja ini adalah adanya Pelayanan dengan Sistem Layanan Rujukan terpadu (SLRT), adanya partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Sedangkan faktor yang menghambat capaian kinerja IKM adalah adanya peningkatan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang harus ditangani memerlukan waktu dan sumber daya yang besar, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya informasi publik terkait persyaratan pelayanan.

Rekomendasi tindak lanjut untuk mengoptimalkan capaian IKM Dinas Sosial adalah perlu menambahkan sarana dan prasarana seperti kanopi untuk tempat parkir kendaraan, menyediakan tempat baca dan arena bermain anak, serta mengoptimalkan publikasi informasi pelayanan.

Indikator berikutnya adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah. Pada Tahun 2026 Triwulan I dan II masih menggunakan nilai didapatkan dari hasil pengukuran indikator kinerja Nilai Perangkat Daerah Tahun 2025 sebesar 78,20 dari target sebesar 70 dengan capaian 100% memiliki kategori “Sangat Tinggi”. Dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%. Dinas Sosial setiap tahun telah mengirim dokumen AKIP ke Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka Evaluasi AKIP Internal yang dilakukan oleh APIP.

Faktor Pendorong capaian nilai AKIP Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. adanya keselarasan (*cascading*) yang jelas antara tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial dengan program/kegiatan;

2. adanya evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
3. adanya teknologi informasi dan komunikasi sehingga akses terhadap informasi mengenai kegiatan dan anggaran pemerintah menjadi lebih mudah, memungkinkan kontrol publik yang lebih besar.

Faktor penghambat dari capaian nilai AKIP Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. belum tersusun Laporan Monev Renaksi;
2. belum terdapat penyesuaian aktivitas pada Rencana Aksi Tahun 2025;
3. belum terdapat penyesuaian aktivitas pada Renaksi atas monev triwulanan yang telah dilakukan.

Rekomendasi tindak lanjut dalam mengoptimalkan nilai AKIP Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. menyusun Laporan Monev Renaksi 2025;
2. menyesuaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. menyempurnakan Rencana Aksi Tahun 2025.

A. INDIKATOR PROGRAM

1. Program Pemberdayaan Sosial : Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial

Realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dengan indikator Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial adalah 100% dibandingkan dengan target.

Faktor pendorong dari indikator Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial adalah Tingginya motivasi dan partisipasi aktif dari PSKS dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial.

Sedangkan faktor penghambat dari indikator Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial adalah PPKS terkadang terlalu bergantung kepada instruksi dari Dinsos sehingga

kurang kreatif dalam menciptakan inisiatif mandiri. Sehingga upaya tindak lanjutnya adalah Memberikan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia PPKS

2. **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan : Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Pengukuran capaian kinerja program 2 Dinas Sosial Tahun 2025 Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang didukung 1 indikator kinerja masuk ke dalam kategori “Sangat Tinggi” sebagaimana tabel 2.2

Faktor pendorong tercapainya indikator sasaran tersebut adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa/Kelurahan, Pendamping Rehabilitasi Sosial, TKSK, dan Dinas Sosial untuk menindaklanjuti laporan dari Masyarakat

Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum dapat diberikan bantuan secara maksimal karena belum dapat dilakukan intervensi lebih lanjut. Sehingga rekomendasi tindak lanjutnya adalah melaksanakan asesmen secara mendalam kepada klien yang layak diberikan bantuan sosial dan melakukan pendampingan lebih lanjut.

3. **Program Rehabilitasi Sosial : Meningkatnya Rehabilitasi Sosial**

Pengukuran capaian kinerja Program 3 Dinas Sosial pada triwulan 1 Tahun 2026 Meningkatnya Rehabilitasi Sosial, yang didukung oleh 4 indikator kinerja masuk ke dalam kategori “Sangat Tinggi” . Meningkatnya Rehabilitasi Sosial tercapai 100 % dengan rincian sebagai berikut:

- Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target 100 % dan tercapai 100%.
- Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target 100 % dan tercapai 100%.

- Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target 100 % dan tercapai 100%.
- Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti dengan target 100 % dan tercapai 100%.

Faktor yang menghambat indikator kinerja sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Sosial yaitu:

a. masih banyaknya lanjut usia yang tidak dapat diterima di panti pelayanan lansia dikarenakan kondisi lansia yang sudah bedrest sementara tidak ada keluarga yg merawat keterbatasan daya tampung panti lansia milik pemerintah.
b. kurangnya anggaran untuk operasional Rumah Singgah yang antara lain disebabkan karena keterbatasan daya tampung panti menyebabkan kesulitan mencarikan panti rujukan sehingga pelayanan yang diberikan rumsing semakin lama melebihi indeks layanan yang seharusnya 7 hari

Faktor yang mendorong optimalisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Sosial adalah:

a. Dukungan dari pusat (Semua UPT Kemensos: Sentra terpadu Kartini Temanggung.
b. Panti pelayanan sosial milik Propinsi sehingga dapat dilakukan pelayanan rujukan ke panti rehabilitasi terkait antara lain sebagai berikut:
    - Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pucang Gading Semarang;
    - Panti Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Margo Widodo Semarang;
    - Panti Pelayanan Lanjut Usia Cepiring Kendal;
    - Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu Kendal;
    - Rumah Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlatar Mardi Guno Kebumen;
    - Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Martani Cilacap;
    - Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Inteltual Raharjo Sragen;

Upaya untuk menindaklanjuti hambatan dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Sosial adalah:

a. melakukan koordinasi dengan stake holder dikarenakan untuk rehabilitasi sosial ini diperlukan penanganan yang bersifat komperhensif dan berkelanjutan;
b. perlu adanya dukungan keluarga dalam memberikan perawatan dan pengawasan terhadap klient setelah purna layanan di rumsing dan sudah di reunifikasi dengan keluarga;
c. adanya penambahan kuota penerimaan di panti pelayanan sosial;
d. Selalu memanfaatkan sistem sumber yang ada.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial: Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pengukuran capaian kinerja Program 4 Dinas Sosial pada triwulan 1 Tahun 2026 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, yang didukung 2 indikator kinerja masuk ke dalam kategori "Sangat Tinggi" sebagaimana tabel 2.2.

Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial tercapai 100% dengan rincian sebagai berikut :

a. Persentase Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan dengan target 100 % dan tercapai 100%.
b. Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan dengan target 86 % dan tercapai 100%.

Faktor yang mendorong tercapainya indikator sasaran Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan adalah partisipasi aktif TKSK dan Pendamping Sosial Kemensos dalam pendampingan pemutakhiran data. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kekosongan personil pendata desa dikarenakan purna tugas atau mundur resign. Upaya tindak lanjut untuk mengoptimalkan kinerja sasaran Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan adalah Dinas Sosial berkoordinasi dengan TKSK melakukan pedampingan mendorong desa untuk melakukan penggantian personil atau menugaskan staf nya sebagai pendata desa

Faktor yang mendorong tercapainya indikator kinerja sasaran Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan adalah peran dan partisipasi aktif pendamping KUBE yang terus melakukan

Pendampingan Sosial bagi perkembangan usaha UEP KUBE memberikan saran masukan atas permasalahan dalam mengelola usaha kelompok, Sedangkan faktor penghambatnya adalah masalah dan konflik internal KUBE dalam menjalankan usaha serta masih adanya UEP KUBE yang pasif dalam melakukan pengembangan usaha. Upaya untuk mengoptimalkan tercapainya indikator kinerja sasaran Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan adalah asesmen permasalahan UEP KUBE yang di hadapi, diberikan motivasi, saran, masukan, melakukan koordinasi dengan pengampu program di Dinas Sosial atau merujuk kepada sistem sumber sesuai permasalahan seta melakukan Inovasi Usaha UEP KUBE.

5. Program Penanganan Bencana : Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana

Dari tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya perlindungan korban bencana dengan 1 (satu) Indikator adalah 100%

Faktor yang mendorong tercapainya indikator kinerja sasaran Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota adalah Stakeholder terkait penanganan bencana di Kabupaten Temanggung mempunyai kerjasama yang baik sehingga saat terjadi bencana saling melengkapi untuk tindakan tanggap darurat kepada masyarakat mulai dari sarana, prasarana dan bantuan.

Sedangkat faktor penghambatnya adalah Kurangnya variasi bantuan sandang dan makanan untuk korban bencana. Untuk mengoptimalkan indikator kinerja sasaran Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota adalah Dinas Sosial berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Sentra Terpadu Kartini Temanggung untuk menambah variasi bantuan logistik korban bencana

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Dari tabel 2.2 di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan 1 (satu) Indikator adalah 100%.

Faktor yang menghambat capaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan adalah Keterbatasan jumlah personil, Faktor alam dan cuaca, luas lahan yang terbatas untuk parkir kendaraan dan transit.

Sedangkan faktor pendorongnya adalah Adanya kesadaran nasionalisme yang tinggi membuat pemeliharaan TMP dilakukan semaksimal mungkin, serta adanya partisipasi masyarakat dan instansi untuk ikut serta menjaga dan memelihara TMP.

Upaya tindak lanjut untuk mengoptimalkan indikator sasaran Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan adalah Penjadwalan pemeliharaan rutin TMP sehingga kebersihan akan selalu terjaga, rehabilitasi fisik secara berkala (pengecatan nisan, perbaikan jaringan listrik dan air secara periodik), Melakukan monitoring rutin, dan digitalisasi data makam, mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan selama berziarah.

B. INDIKATOR SPM URUSAN SOSIAL

Indikator SPM Bidang Sosial terdiri dari:

1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten.

Untuk capaian Bidang Sosial sudah tercapai 100 % dengan jumlah yang terlayani penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis sebanyak 1054 orang dan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 673 orang. Dengan capaian tersebut SPM Bidang Sosial mendapat predikat *Tuntas Paripurna*.

Beberapa faktor pendorong dalam pelayanan SPM Bidang Sosial:

1. Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa/Kelurahan, Pendamping Rehabilitasi Sosial, TKSK, dan Dinas Sosial untuk menindaklanjuti laporan dari Masyarakat
2. Kerjasama antara SDM UPTD rumah singgah dan kerjasama dengan instansi terkait semakin kuat sehingga penanganan PPKS cepat tertangani
3. Adanya layanan terapi bagi penyandang disabilitas di Sentra Terpadu Kartini dan Rumah Terapi "Tanda Cinta" di Dinas Sosial
4. Adanya koordinasi dan kerjasama dari lintas sektor terkait penanganan kasus terhadap anak terlantar
5. Kerjasama lintas sektoral berupa bantuan paket makanan dari berbagai elemen seperti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan PSKBA Kementerian Sosial oleh Sentra Terpadu Kartini Temanggung.

Sedangkan beberapa faktor penghambatnya :

1. Berkurangnya SDM yang khusus menangani kasus anak terlantar
2. Terdapat syarat administrasi yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya
3. Sulitnya mencari rujukan panti bagi lansia karena kuota yang sudah penuh
4. Kendaraan operasional mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan keluar kota dalam rangka pendampingan PPKS
5. Beberapa wilayah belum memiliki relawan sehingga penanganan bencana sedikit terhambat.

Beberapa rekomendasi untuk menindaklanjuti penanganan SPM Bidang Sosial antara lain:

1. Terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya target di bidang anak terlantar
2. Membuka layanan Rumah Terapi di Dinas Sosial
3. Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada keluarga serta menjalin koordinasi dengan panti sosial lansia
4. Peminjaman kendaraan operasional di bidang lain atau disekretariat Dinas Sosial guna mendukung terlaksananya kegiatan penanganan PPKS
5. Perekrutan relawan taruna siaga bencana untuk wilayah rawan bencana.

C. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator Kinerja Kunci terdiri dari:

1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti.
2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti.
3. Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti.
4. Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti.
5. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten.
6. Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian Indikator Kinerja Kunci:

1. Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa/Kelurahan, Pendamping Rehabilitasi Sosial, TKSK, dan Dinas Sosial untuk menindaklanjuti laporan dari Masyarakat
2. Kerjasama antara SDM UPTD rumah singgah dan kerjasama dengan instansi terkait semakin kuat sehingga penanganan PPKS cepat tertangani
3. Adanya layanan terapi bagi penyandang disabilitas di Sentra Terpadu Kartini dan Rumah Terapi “Tanda Cinta” di Dinas Sosial
4. Adanya koordinasi dan kerjasama dari lintas sektor terkait penanganan kasus terhadap anak terlantar
5. Kerjasama lintas sektoral berupa bantuan paket makanan dari berbagai elemen seperti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan PSKBA Kementerian Sosial oleh Sentra Terpadu Kartini Temanggung.
6. Adanya keterlibatan lintas sektor dalam penanganan PPKS

Sedangkan beberapa faktor penghambatnya :

1. Berkurangnya SDM yang khusus menangani kasus anak terlantar
2. Terdapat syarat administrasi yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya

3. Sulitnya mencari rujukan panti bagi lansia karena kuota yang sudah penuh
4. Kendaraan operasional mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan keluar kota dalam rangka pendampingan PPKS
5. Beberapa wilayah belum memiliki relawan sehingga penanganan bencana sedikit terhambat.
6. Masih ditemukan adanya persyaratan administrasi yang menyebabkan tidak terlayaninya PM dengan cepat.

Beberapa rekomendasi untuk menindaklanjuti pencapaian Indikator Kunci antara lain:

1. Terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya target di bidang anak terlantar
2. Membuka layanan Rumah Terapi di Dinas Sosial
3. Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada keluarga serta menjalin koordinasi dengan panti sosial lansia
4. Peminjaman kendaraan operasional di bidang lain atau disekretariat Dinas Sosial guna mendukung terlaksananya kegiatan penanganan PPKS
5. Perekrutan relawan taruna siaga bencana untuk wilayah rawan bencana.
6. Peningkatan kerjasama lintas sektor dan memaksimalkan prasarana yang tersedia.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagaimana berikut:

Tingkat kinerja Dinas Sosial dari 14 indikator terdapat kondisi indikator semua indikator telah tercapai target 100 %, antara lain:

1. Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2. Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani
3. Nilai IKM Perangkat Daerah
4. Nilai AKIP Perangkat Daerah
5. Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial
6. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
7. Persentase anak telantar yangmemperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
8. Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
9. Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
10. Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
11. Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan
12. Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif
13. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota
14. Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, antara lain :

- Sangat dinamisnya populasi PPKS baik jumlah maupun permasalahannya sementara ketersediaan sumberdaya baik sarpras, SDM maupun dukungan anggaran sangat terbatas menyulitkan penanganan PPKS secara optimal.
- Belum optimalnya pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam memberikan bantuan sosial;
- Kurang optimalnya PSKS dalam melakukan pendampingan sosial dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS);
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, antara lain :
- Adanya kondisi yang dinamis terkait data calon penerima sehingga terjadi perubahan jumlah sasaran yang mengakibatkan adanya perubahan dari perencanaan semula sehingga pencairan dilakukan menunggu APBD Perubahan 2.
- Jadwal pelaksanaan verval DKD dilaksanakan per semester sehingga pada triwulan 1 belum terealisasi.
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan akan dilakukan perubahan dan perbaikan data penerima bansos anak panti dilaksanakan dan verval DKD akan dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan pada triwulan 2 dan melakukan sosialisasi dan Bimtek kepada TKSK dan Petugas pendata.
- Banyaknya aduan yang masuk ke SLRT Dinas Sosial terutama dampak dari penonaktifan PBI JKN

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun pencapaian program nasional antara lain:

- Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), akibat tingginya dinamika permasalahan sosial yang belum sepenuhnya dapat diimbangi dengan ketersediaan sumber daya, serta sarana prasarana,
- Belum optimalnya ketepatan sasaran program perlindungan dan jaminan sosial, sebagai akibat dari pemutakhiran data PPKS yang belum optimal. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pemberian bantuan sosial dan upaya pengentasan kemiskinan.

- Terhambatnya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kerentanan sosial, karena perubahan data dan jumlah sasaran penerima bantuan membutuhkan proses verifikasi, validasi, serta penyesuaian perencanaan dan penganggaran.
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemandirian sosial, karena peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pendampingan dan penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) masih perlu ditingkatkan.
- Tertundanya sebagian pelaksanaan program bantuan sosial, khususnya akibat adanya perubahan data calon penerima dan kebutuhan penyesuaian anggaran, sehingga dapat mempengaruhi pencapaian target dan indikator kinerja program pada periode berjalan.
- Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial, sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan data yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial.
- Meningkatnya beban pelayanan pengaduan masyarakat melalui SLRT, terutama terkait penonaktifan PBI JKN, yang berpotensi menghambat akses sebagian masyarakat terhadap perlindungan jaminan kesehatan apabila tidak segera mendapatkan tindak lanjut.
- Berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, penanganan kelompok rentan, dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
- Dalam mendukung pencapaian program nasional di bidang perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan menjadi kurang optimal apabila kualitas dan ketepatan data penerima manfaat belum sepenuhnya terjamin, karena data yang akurat merupakan salah satu dasar penting dalam penetapan sasaran program bantuan dan perlindungan sosial.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial, antara lain :

Tantangan Pelayanan Dinas Sosial:

- Akurasi Data: Data penerima bantuan sering tidak tepat sasaran akibat lambatnya proses pembaruan data warga.

- Keterbatasan Anggaran: Dana operasional dan fasilitas rehabilitasi belum sebanding dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Kompleksitas Masalah: Masalah seperti kemiskinan ekstrem, disabilitas, dan penanganan ODGJ membutuhkan pendekatan jangka panjang yang tidak instan.
- Keterbatasan Sumber Daya: Jumlah tenaga pendamping sosial masih kurang dibanding luasnya wilayah kerja.

Peluang Peningkatan Pelayanan Dinas Sosial:

- Digitalisasi Layanan: Penggunaan aplikasi atau sistem berbasis data online mempercepat pengaduan dan penyaluran bantuan.
- Kolaborasi dan Kemitraan: Kerja sama dengan pihak swasta, lembaga non-profit, dan relawan memperluas jangkauan bantuan.
- Pemberdayaan Berbasis Komunitas: Pembentukan pusat kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput mendekatkan akses layanan kepada warga.
- Dukungan Kebijakan: Komitmen pemerintah daerah memperkuat transparansi program pemberdayaan ekonomi agar warga lekas mandiri

Formulasi isu-isu penting :

1. Diperlukan pemutakhiran data penanggulangan kemiskinan yang lebih intensif untuk mendapatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial maupun Bansos.
2. Diperlukan upaya terobosan program kegiatan untuk solusi banyaknya penon aktifan PBI JKN.

2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD

Kamus usulan kegiatan merupakan kelompok usulan permasalahan yang disusun dalam SIPD yang sudah disesuaikan dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah (Program prioritas yang yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029). Tujuan penyusunan Kamus kegiatan adalah untuk memastikan agar usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Verifikasi yang dilakukan mulai dari User sekretariat DPRD sampai dengan user Perangkat Daerah adalah untuk memastikan kembali bahwa usulan permasalahan/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD telah sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program

Perangkat Daerah. Secara rinci rumusan Kamus kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPD TUJUAN	PROGRAM
Sosial	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Usulan pokok pikiran di tahun 2027 terdapat satu kegiatan yaitu pengadaan sarana dan prasarana untuk KUBE Berkah Manunggal Desa Drono Kecamatan Tembarak, di mana jenis usaha KUBE tersebut adalah persewaan alat lagan dan prasmanan. Setelah dilakukan verifikasi lapangan pada tanggal 6 Mei 2026, pokok pikiran tersebut tidak memenuhi syarat karena jenis usaha yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tema tahunan RKPD 2027. Jadi, di tahun 2027 tidak ada pokir yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

2.5. *Review* terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut yaitu jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dari rancangan awal sampai ke analisis kebutuhan tidak mengalami perubahan, demikian juga dari jumlah PAGU anggaran tidak ada perubahan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 5 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					**12.410.859.514**	**1**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					**17.002.564.151**	
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**1.291.499.786**	**A.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**5.883.204.423**	
a.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Temanggung**	**Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu**			1.500.000	a.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Temanggung**	**Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu**			1.500.000	
1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	tersedianya perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	7	dokumen	1.500.000	1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	tersedianya perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	7	dokumen	1.500.000	
b,	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Temanggung**	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai**			**0**	**b,**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Temanggung**	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai**			4.591.708.597	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang menrima Gaji	38	Orang	0	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang menrima Gaji	38	Orang	4.591.708.597	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
c.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Temanggung**	**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**88.292.460**	c.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Temanggung**	**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**88.292.460**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	9.500.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	9.500.000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	14.250.000	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	14.250.000	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	9.500.000	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	9.500.000	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Laporan	24.959.000	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Laporan	24.959.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	30.083.460	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	30.083.460	
d	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Temanggung**	**Terpenuhinya Penyediaan Jasa Urusan Perangkat Daerah**			**992.510.695**	**d**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Temanggung**	**Terpenuhinya Penyediaan Jasa Urusan Perangkat Daerah**			**992.510.695**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	7.200.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	7.200.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	79.785.750	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	79.785.750	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	269.091.600	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	269.091.600	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	636.433.345	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	636.433.345	
e	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Temanggung**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**209.196.631**	**e**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Temanggung**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**209.196.631**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90	Unit	155.846.250	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90	Unit	155.846.250	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	53.350.381	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	53.350.381	
B.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					**50.000.000**	**B.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					**50.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Temanggung	**Trlaksanya sosialisasi tentang teknis pemberian penerbirian ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat**			**5.000.000**	**1**	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Temanggung	**Trlaksanya sosialisasi tentang teknis pemberian penerbirian ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat**			**5.000.000**	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20	Dokumen	5.000.000	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20	Dokumen	5.000.000	
b	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Temanggung**	**Pembinaan dan Pelatihan PSM dan fasilitasi program-program kegiatan PSM perekrutan anggota psm.**			**45.000.000**	**b**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Temanggung**	**Pembinaan dan Pelatihan PSM dan fasilitasi program-program kegiatan PSM perekrutan anggota psm.**			**45.000.000**	
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Lembaga	10.000.000	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Lembaga	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Temanggung	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	5.000.000	2	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Temanggung	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	5.000.000	
3	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	20	Lembaga	5.000.000	3	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	20	Lembaga	5.000.000	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	40	Orang	10.000.000	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	40	Orang	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
5	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Kab. Temanggung	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	2400	Laporan	5.000.000	5	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Kab. Temanggung	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	2400	Laporan	5.000.000	
6	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	40	Orang	10.000.000	6	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	40	Orang	10.000.000	
C	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**					**7.500.000**	**C**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**					**7.500.000**	
a	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.			**7.500.000**	**a**	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.			**7.500.000**	
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di	Kab. Temanggung	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi	3	Orang	7.500.000	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi	Kab. Temanggung	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi	3	Orang	7.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota					di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				
D	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					**914.750.000**	**D**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					**914.750.000**	
a1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Kab. Temanggung**	**Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**			**566.500.000**	**a1**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Kab. Temanggung**	**Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**			**566.500.000**	
1	Penyediaan Permakanan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3	orang	2.000.000	1	Penyediaan Permakanan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3	orang	2.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Penyediaan Sandang	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35	orang	5.000.000	2	Penyediaan Sandang	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35	orang	5.000.000	
3	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	orang	10.000.000	3	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	orang	10.000.000	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	orang	5.000.000	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	orang	5.000.000	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Temanggung	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40	orang	5.000.000	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Temanggung	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40	orang	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Temanggung	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50	orang	25.000.000	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Temanggung	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50	orang	25.000.000	
7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	2	orang	2.500.000	7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	2	orang	2.500.000	
8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	orang	8.000.000	8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	orang	8.000.000	
9	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	79	orang	494.000.000	9	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	79	orang	494.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	orang	4.000.000	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	orang	4.000.000	
11	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24	orang	5.000.000	11	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24	orang	5.000.000	
12	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	3	orang	1.000.000	12	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	3	orang	1.000.000	
b	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan**	**Kab. Temanggung**	**Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan**			**348.250.000**	**b**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan**	**Kab. Temanggung**	**Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan**			**348.250.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	NAPZA di Luar Panti Sosial		**Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**					**NAPZA di Luar Panti Sosial**		**Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**				
1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	orang	348.250.000	1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	orang	348.250.000	
E	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					**9.984.109.728**	**E**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					**9.984.109.728**	
a	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Kab. Temanggung**	**Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Anak-anak Terlantar**			**806.631.000**	**a**	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Kab. Temanggung**	**Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Anak-anak Terlantar**			**806.631.000**	
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Temanggung	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	269	Anak	799.131.000	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Temanggung	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	269	Anak	799.131.000	
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kab. Temanggung	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	7.500.000	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kab. Temanggung	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	7.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
b	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota**			**9.177.478.728**	**b**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota**			**9.177.478.728**	
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	392.920	Orang	40.000.000	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	392.920	Orang	40.000.000	
2	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Temanggung	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	100.000.000	2	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Temanggung	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	100.000.000	
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Temanggung	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	114.249	Orang	9.027.478.728	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Temanggung	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	114.249	Orang	9.027.478.728	
4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	75.754	Orang	10.000.000	4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	75.754	Orang	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Mis*kin*					0		Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Mis*kin*					0	
F	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					87.000.000	F	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					87.000.000	
a	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Kab. Temanggung**	**Terfasilitasinya kebutuhan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan kerentanan sosial**			45.500.000	**a**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Kab. Temanggung**	**Terfasilitasinya kebutuhan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan kerentanan sosial**			45.500.000	
1	Penyediaan Makanan	Kab. Temanggung	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 Hari dalam masa Tanggap Darurat (Pengungsian)Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	21.000.000	1	Penyediaan Makanan	Kab. Temanggung	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 Hari dalam masa Tanggap Darurat (Pengungsian)Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	21.000.000	
2	Penyediaan Sandang	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	20.000.000	2	Penyediaan Sandang	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	100	Orang	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
										Kewenangan Kabupaten/Kota				
3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	1.500.000	3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	1.500.000	
4	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Temanggung	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	1.000.000	4	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Temanggung	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	1.000.000	
5	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Temanggung	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	2.000.000	5	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Temanggung	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	2.000.000	
b	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Kab. Temanggung**	**Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat pencegahan penanggulangan bencana**			41.500.000	**b**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Kab. Temanggung**	**Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat pencegahan penanggulangan bencana**			41.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	41.500.000		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	41.500.000	
G	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**					76.000.000	**G**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**					76.000.000	
a	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Kab. Temanggung**	**Terfasilitasinya kebutuhan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Daerah Kabupaten/Kota**			76.000.000	**a**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Kab. Temanggung**	**Terfasilitasinya kebutuhan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Daerah Kabupaten/Kota**			76.000.000	
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	250	Makam	76.000.000	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	250	Makam	76.000.000	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

Tabel 2. 6 Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Temanggung

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	NIHIL				

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

2.7. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi perangkat daerah dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Sosial ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Daftar Inovasi Perangkat Daerah

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Layanan Kedaruratan	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pekerja Sosial Pedamping Sosial	APBD	1. Petugas Lapangan menerima aduan dari masyarakat 2. Petugas Lapangan melaksanakan home visit / asesmen awal 3. Petugas Lapangan melakukan koordinasi dengan Desa atau Kelurahan untuk mengajukan proposal permohonan Bansos JPS 4. Petugas Bidang Rehabilitasi Sosial menerima proposal yang sudah terdaftar di SLRT untuk ditindaklanjut 5. Petugas Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan asesmen lanjutan 6. Pemberian Bansos JPS berdasarkan hasil asesmen lanjutan	Terlaksananya kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Terlaksananya rapid assesment terhadap kebutuhan sosial PPKS Pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman sosial (JPS) kepada individu yang jumlahnya berdasarkan hasil asesmen	Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap respon cept Dinas Sosial Berkurangnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejadian darurat	Dinas Sosial 2025
2.	Sistem Informasi Ruang Data Bahagia		Dana Bagi Hasil Cukai Temangg ung	Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk membantu dalam pengelolaan data buruh tani tembakau, record dan upload data	Adanya sistem informasi yang berfungsi sebagai aplikasi pengelolaan data buruh tani tembakau,	Tersedia sistem informasi Ruang Data Bahagia untuk membantu kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	2024-saat ini

			Tahun 2024	Excel, serta sinkronasi atau menggabungkan/mencocokkan data dari dua sumber atau lebih, dan sekaligus bisa menampilkan grafik data. Selain itu pada user masyarakat, Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan dalam pengusulan bantuan sosial utamanya bantuang sosial yang bersumber dari APBD II.	record/perekaman data Excel ke aplikasi dan sinkronasi atau penggabungan data dari dua sumber atau lebih serta aplikasi pengajuan bantuan oleh masyarakat berbasis android/smartphone.	dalam mengelola data buruh tani tembakau dan menangani data data masyarakat untuk keperluan bantuan sosial serta aplikasi pengajuan bantuan oleh masyarakat berbasis android.	
3.	Optimalisasi Fasilitasi Pengelolaan Agenda Kegiatan Melalui Penggunaan *Web Google Calendar* Di Subbagian Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	ASN Dinas Sosial	APBD	1. Mengidentifikasi data dan kondisi pengelolaan agenda kegiatan di Subbagian Perencanaan 2. Menyiapkan laman *google calendar* untuk pengelolaan dan penginputan agenda kegiatan 3. Membuat video dan buku manual Petunjuk Teknis penginputan agenda kegiatan ke dalam *google calendar* 4. Memberikan edukasi tentang pemanfaatan *google calendar* kepada seluruh staf subbagian perencanaan 5. Melakukan simulasi penginputan agenda kegiatan ke *google calendar* 6. Melakukan evaluasi pemanfaatan *google calendar* untuk subbagian perencanaan	Tersedianya *Web Google Calendar* sebagai media pengelolaan agenda kegiatan di Subbagian Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam pengelolaan serta pemantauan agenda kegiatan di Subbagian Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	Dinas Sosial 2025

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

2.8. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Sosial ada 3 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penghargaan sebagai kabupaten yang telah optimal dalam melaksanakan pemutakhiran data terpadu Jawa Tengah (DT Jateng)	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	Dinas Sosial
2	Penghargaan sebagai kabupaten paling proaktif dan peduli dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2024	BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng DIY	Provinsi	Dinas Sosial
3	Penghargaan sebagai WILKER Graduasi PPKS terbanyak Sentra Terpadu Kartini di Temanggung	Kementrian Sosial RI	Nasional	Dinas Sosial

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Sosial lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Tujuan Dinas Sosial yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Sosial 2025-2029 adalah "Meningkatnya penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)" dengan sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani dan Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Sosial .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Sosial Kab. Temanggung pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
Meningkatnya penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).			Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	85,1	87,50
	Meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani		Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani	%	70,2	75,00
		Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik	%	100	100

			Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar pant	%	100	100
			Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar pan	%	100	100
			Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100
			Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100	100
			Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	%	86	86

		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kot	%	100	100
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100
	Meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani dan Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	87,02	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	74	

Sumber : Renstra Dinas Sosial *Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.*

Kebijakan dan strategi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Tahun 2025-2029.

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Sosial

Pada Tahun Anggaran 2027, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung melaksanakan 7 Program, 15 Kegiatan, dan 48 Sub Kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial memiliki cakupan seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Untuk mendukung pelaksanaan 7 Program, 15 Kegiatan, dan 48 Sub Kegiatan tersebut, Dinas Sosial mengalokasikan kebutuhan pendanaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun total kebutuhan dana (pagu indikatif) Tahun 2027 adalah sebesar Rp17.002.564.151,00 yang digambarkan pada tabel berikut ini:

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi:

- Dinas Sosial terdapat 7 program dan 15 kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan berada di Kabupaten Temanggung.
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Tabel 3. 2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Temanggung Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Sosial						**17.002.564.151**							**9.693.243.281**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.002.564.151**							**9.693.243.281**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**17.002.564.151**							**9.693.243.281**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**						**5.883.204.423**							**6.097.208.597**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000					ASN DINAS SOSIAL		1.500.000	
		-						1.500.000					ASN DINAS SOSIAL		1.500.000	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000						-	1.500.000	

	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.500.000							1.500.000	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	7 Dokumen	1.500.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	1.500.000	Dinas Sosial
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.591.708.597					-		4.591.708.597	
		-						4.591.708.597					-		4.591.708.597	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.591.708.597						-	4.591.708.597	

	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.591.708.597							4.591.708.597	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	38 Orang /bulan	4.591.708.597	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.591.708.597	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						88.288.500					ASN DINAS SOSIAL		107.000.000	
		-						88.288.500					ASN DINAS SOSIAL		107.000.000	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	24.959.000						-	38.000.000	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	30.079.500						-	37.000.000	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	14.250.000						-	14.000.000	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	9.500.000						-	7.000.000	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	-		-	-	9.500.000						-	11.000.000	

			angan Bangunan Kantor yang Disediakan												
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					9.500.000							11.000.000	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	20 Paket	9.500.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	11.000.000	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					14.250.000							14.000.000	

		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	14.250.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	14.000.000	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.500.000							7.000.000	

		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	9.500.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	7.000.000	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						24.959.000							38.000.000	

		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	36 Laporan	24.959.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	38.000.000	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.079.500							37.000.000	

		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	25 Laporan	30.079.500	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	37.000.000	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						992.510.695					ASN DINAS SOSIAL		1.167.000.000	
		-						992.510.695					ASN DINAS SOSIAL		1.167.000.000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	79.785.750						-	95.000.000	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	636.433.345						-	1.060.000.000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	269.091.600						-	7.000.000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	7.200.000						-	5.000.000	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.200.000							5.000.000	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	7.200.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	5.000.000	Dinas Sosial

										milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					79.785.750							95.000.000	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	79.785.750	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	95.000.000	Dinas Sosial

										generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					269.091.600							7.000.000	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	269.091.600	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	7.000.000	Dinas Sosial

										generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					636.433.345							1.060.000.000	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	636.433.345	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z),	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	1.060.000.000	Dinas Sosial

										dan penyandang disabilitas.					
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					209.196.631					ASN DINAS SOSIAL		230.000.000	
		-					209.196.631					ASN DINAS SOSIAL		230.000.000	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	53.350.381						-	70.000.000	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	-		-	-	155.846.250						-	160.000.000	

			Pajak dan Perizinannya												
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					155.846.250							160.000.000	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	90 Unit	155.846.250	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	160.000.000	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor						53.350.381							70.000.000	

		dan Bangunan Lainnya													
		Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	6 Unit	53.350.381	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	70.000.000	Dinas Sosial
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial**					**50.000.000**							**282.500.000**	

			Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	-		-	100 %	50.000.000						-	282.500.000	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000					PSKS		7.500.000	
		-						5.000.000					PSKS		7.500.000	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-		-	-	5.000.000						-	7.500.000	
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						5.000.000							7.500.000	

		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-		-	20 Dokumen	5.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	7.500.000	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						45.000.000					PSKS		275.000.000	
		-						45.000.000					PSKS		275.000.000	
			Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	-		-	-	5.000.000						-	15.000.000	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang	-		-	-	10.000.000						-	110.000.000	

			Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	10.000.000						-	50.000.000	
			Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	-		-	-	5.000.000						-	30.000.000	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan	-		-	-	5.000.000						-	20.000.000	

			Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	-		-	-	10.000.000						-	50.000.000	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						10.000.000							110.000.000	

		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	30 Lembaga	10.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	110.000.000	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						5.000.000							20.000.000	

		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	5.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	20.000.000	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota						5.000.000							30.000.000	

		Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	-		-	20 Lembaga	5.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	30.000.000	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						10.000.000							50.000.000	

		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	40 Orang	10.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	50.000.000	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial						5.000.000							15.000.000	

		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	-		-	2400 Laporan	5.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	15.000.000	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000							50.000.000	

		Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	-		-	40 orang	10.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	50.000.000	Dinas Sosial
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**						**7.500.000**							**15.000.000**	
			Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	-		-	100 %	7.500.000						-	15.000.000	

			Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal												
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Keluraha n Asal					7.500.000					PPKS		15.000.000	
		-					7.500.000					PPKS		15.000.000	
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	7.500.000						-	15.000.000	

	1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						7.500.000							15.000.000	
		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	3 Orang	7.500.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	15.000.000	Dinas Sosial
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**914.750.000**							**1.554.149.184**	

			Persentase penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	-		-	100 %	551.500.000						-	940.265.824	
			Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	-		-	100 %	348.250.000						-	523.883.360	
			Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	-		-	100%	551.500.000						-	940.265.824	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						566.500.000					ppks		1.030.265.824	
		-						566.500.000					ppks		1.030.265.824	

			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000						-	10.000.000	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	2.500.000						-	5.000.000	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000						-	50.000.000	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	8.000.000						-	10.000.000	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	-		-	-	494.000.000						-	500.000.000	

			Kabupaten/Kota												
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	4.000.000						-	10.000.000	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000						-	10.000.000	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	2.000.000						-	350.000.000	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan	-		-	-	5.000.000						-	20.000.000	

			Kabupaten/Kota												
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	1.000.000						-	5.265.824	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000						-	10.000.000	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	-		-	-	25.000.000						-	50.000.000	

			Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota												
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan					2.000.000							350.000.000	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	3 Orang	2.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	350.000.000	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						5.000.000							20.000.000	

		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	35 Orang	5.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	20.000.000	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						10.000.000							50.000.000	

		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	5 Orang	10.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	50.000.000	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						5.000.000							10.000.000	

		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	4 Orang	5.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	10.000.000	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						5.000.000							10.000.000	

		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	40 Orang	5.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	10.000.000	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						25.000.000							50.000.000	

		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	25.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	50.000.000	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						2.500.000							5.000.000	

		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	2 Orang	2.500.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	5.000.000	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						8.000.000							10.000.000	

		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	100 Orang	8.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	10.000.000	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						494.000.000							500.000.000	

		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	79 Orang	494.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	500.000.000	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						4.000.000							10.000.000	

		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	4 Orang	4.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	10.000.000	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						5.000.000							10.000.000	

		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	24 Orang	5.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	10.000.000	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota						1.000.000							5.265.824	

		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	3 Orang	1.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	5.265.824	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						348.250.000					PPKS		523.883.360	
		-						348.250.000					PPKS		523.883.360	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	-		-	-	348.250.000						-	523.883.360	

			Kabupaten/Kota												
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan					348.250.000							523.883.360	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	348.250.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	523.883.360	Dinas Sosial
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**9.984.109.728**							**1.324.385.500**	
			Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data	-		-	100 %	9.177.478.728						-	420.000.000	

			terpadu penanggulangan kemiskinan												
			Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	-		-	100 %	806.631.000						-	804.385.500	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						806.631.000					PPKS		804.385.500	
		-						806.631.000					PPKS		804.385.500	
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	799.131.000						-	789.385.500	
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	7.500.000						-	15.000.000	
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar						799.131.000							789.385.500	

		Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	267 Orang	799.131.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	789.385.500	Dinas Sosial
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar						7.500.000							15.000.000	

		Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	7.500.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	15.000.000	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						9.177.478.728					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		520.000.000	
		-						9.177.478.728					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		520.000.000	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K	-		-	-	40.000.000						-	100.000.000	

			ota yang Didata												
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	100.000.000						-	290.000.000	
			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0						-	0	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	9.027.478.728						-	100.000.000	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan	-		-	-	10.000.000						-	30.000.000	

			Perbaikan yang dilaksanakan												
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					40.000.000							100.000.000	
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	-		-	392920 Orang	40.000.000	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Temanggung || Kecamatan Temanggung || Kelurahan Temanggung II || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	100.000.000	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					100.000.000							290.000.000	

		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	20 Orang	100.000.000	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Temanggung || Kecamatan Temanggung || Kelurahan Temanggung II || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	290.000.000	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						9.027.478.728							100.000.000	

		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	117529 Orang	9.027.478.728	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Temanggung || Kecamatan Temanggung || Kelurahan Temanggung II || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	100.000.000	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000							30.000.000	

		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-		-	75754 Usulan	10.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	30.000.000	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin						0							0	
		Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	0	Kab. Temanggung	-	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya		-	0	Dinas Sosial

6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					**87.000.000**							**320.000.000**	
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	-		-	100 %	87.000.000						-	320.000.000	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						45.500.000					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		200.000.000	
		-						45.500.000					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		200.000.000	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	1.000.000						-	5.000.000	

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	20.000.000						-	75.000.000	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	1.500.000						-	10.000.000	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	21.000.000						-	75.000.000	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan	-		-	-	2.000.000						-	35.000.000	

			Kabupaten/Kota												
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan					21.000.000							75.000.000	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	150 Orang	21.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	75.000.000	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang					20.000.000							75.000.000	

		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	20.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	75.000.000	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						1.500.000							10.000.000	

		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	1.500.000	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Temanggung || Kecamatan Temanggung || Kelurahan Temanggung II || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	10.000.000	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						1.000.000							5.000.000	

		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	1.000.000	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Temanggung || Kecamatan Temanggung || Kelurahan Temanggung II || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	5.000.000	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						2.000.000							35.000.000	

		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	2.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	35.000.000	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						41.500.000					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		120.000.000	
		-						41.500.000					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		120.000.000	

			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	41.500.000						-	120.000.000	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						41.500.000							120.000.000	
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	60 Orang	41.500.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	120.000.000	Dinas Sosial
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAA**						**76.000.000**							**100.000.000**	

		N TAMAN MAKAM PAHLAWAN													
			Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	-		-	100 %	76.000.000						-	100.000.000	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						76.000.000					Taman Makam Pahlawan (TMP)		100.000.000	
		-						76.000.000					Taman Makam Pahlawan (TMP)		100.000.000	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-		-	-	76.000.000						-	100.000.000	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						76.000.000							100.000.000	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-		-	250 Makam	76.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkata		-	100.000.000	Dinas Sosial

												n akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan				
	J U M L A H							**17.002.564.151**								

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kab. Temanggung Tahun 2025-2029

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temangung di Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2027 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2027 sehinga mengalami beberapa perubahan kembali.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Sosial Tahun 2027 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan**	**Pagu Indikatif**	**Pagu Indikatif**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	12.410.859.514		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	17.002.564.151	4.591.704.637
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.291.499.786	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.883.204.423	4.591.704.637
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	-
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.591.708.597	4.591.708.597
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.591.708.597	4.591.708.597
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.292.460	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.288.500	- 3.960
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.500.000		Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.500.000	-

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.250.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.250.000	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.500.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.500.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.959.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.959.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.083.460		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.079.500	- 3.960
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	992.510.695	d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	992.510.695	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.785.750		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.785.750	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	269.091.600		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	269.091.600	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	636.433.345		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	636.433.345	-
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.196.631	e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.196.631	-

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.846.250		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.846.250	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.350.381		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.350.381	-
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	50.000.000	2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	50.000.000	-
a	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	a	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5.000.000	-
b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	-
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	-
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	5.000.000		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	5.000.000	-
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000		Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	-

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	-
	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	5.000.000		Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	5.000.000	-
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000		Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	-
3.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	7.500.000	3.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	7.500.000	-
a	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	7.500.000	a	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	7.500.000	-
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	7.500.000		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	7.500.000	-
4.	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**914.750.000**	**4.**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**914.750.000**	-
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	566.500.000	a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	566.500.000	-

	Penyediaan Permakanan	2.000.000		Penyediaan Permakanan	2.000.000	-
	Penyediaan Sandang	5.000.000		Penyediaan Sandang	5.000.000	-
	Penyediaan Alat Bantu	10.000.000		Penyediaan Alat Bantu	10.000.000	-
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.000.000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.000.000	-
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5.000.000		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5.000.000	-
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25.000.000		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25.000.000	-
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.500.000		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.500.000	-
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	8.000.000		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	8.000.000	-
	Pemberian Layanan Kedaruratan	494.000.000		Pemberian Layanan Kedaruratan	494.000.000	-
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.000.000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.000.000	-

	Pemberian Layanan Rujukan	5.000.000		Pemberian Layanan Rujukan	5.000.000	-
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000	-
b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	348.250.000	b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	348.250.000	-
	Pemberian Layanan Kedaruratan	348.250.000		Pemberian Layanan Kedaruratan	348.250.000	-
5.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**9.984.109.728**	**5.**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**9.984.109.728**	-
a	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	806.631.000	a	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	806.631.000	-
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	799.131.000		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	799.131.000	-
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	7.500.000		Rujukan Anak-Anak Terlantar	7.500.000	-
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.177.478.728	b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.177.478.728	-
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	-

	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100.000.000		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100.000.000	-
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.027.478.728		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.027.478.728	-
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	-
	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	0		Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	-	-
6.	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**87.000.000**	**6.**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	87.000.000	-
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	45.500.000	a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	45.500.000	-
	Penyediaan Makanan	21.000.000		Penyediaan Makanan	21.000.000	-
	Penyediaan Sandang	20.000.000		Penyediaan Sandang	20.000.000	-
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.500.000		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.500.000	-
	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.000.000		Pelayanan Dukungan Psikososial	1.000.000	-
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2.000.000		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2.000.000	-

b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	41.500.000		b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	41.500.000	-
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	41.500.000			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	41.500.000	-
7.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	76.000.000		7.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	76.000.000	-
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	76.000.000		a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	76.000.000	-
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	76.000.000			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	76.000.000	-
	JUMLAH	12.410.859.514			JUMLAH	17.002.564.151	4.591.704.637

Sumber : SIPD RI Dinas Sosial Kab. Temangung Tahun 2027

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2027 sebesar Rp 4.591.704.637. Jika dilihat lebih rinci untuk kenaikan terjadi pada Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan ketika input rancangan masih nol.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi hasil renja 2025 dan target IKU tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
V	**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**				
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar					
6	**Sosial**				
1	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	91,44	85,10	DINAS SOSIAL
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	82,87	70,20	DINAS SOSIAL

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program pada tingkat pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang paling strategis, kritis, dan mewakili esensi dari suatu program sehingga dapat mencerminkan apakah program tersebut berjalan efektif. Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. 1 indikator kinerja kunci tahun 2027

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB								
6	Sosial	1.f.1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	197	100	Dinas Sosial
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		197		
		1.f.2	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	643	100	Dinas Sosial
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		643		
		1.f.3	Persentase Lanjut UsiaTerlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	132	100	Dinas Sosial
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		132		
		1.f.4	Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	82	100	Dinas Sosial

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		82		
		1.f.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	%	673	100	Dinas Sosial
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten		673		
		1.f.6	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	1054	100	Dinas Sosial
				Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota		1054		

BAB VI

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2027 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Sosial untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Sosial Tahun 2027 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Sosial itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Sosial dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Sosial Tahun 2027 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2027. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2027 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2027 nanti.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2027 Dinas Sosial mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 17.002.564.151,00 ,- yang terdiri dari 7 program antara lain Program Pemberdayaan Sosial; Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; Program Rehabilitasi Sosial; Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial; Program Penanganan Bencana; Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2027 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan

pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 24 Juli 2026

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung,

Agus Sujarwo, AP, M.M.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197508051993111001

Dipindai dengan CamScanner